



KOMITMEN JALANKAN FUNGSI PENGANGGARAN DPRD Kota Yogyakarta Kawal RAPBD Perubahan 2026



YOGYA (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses penganggaran daerah agar berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Komitmen ini ditunjukkan melalui pembahasan mendalam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 bersama jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, menyampaikan bahwa APBD Perubahan merupakan salah satu instrumen politik anggaran yang sangat penting untuk menyesuaikan berbagai program pembangunan daerah dengan kondisi fiskal terkini. "Kami di dewan memastikan fungsi budgeting atau penganggaran berjalan dengan optimal. Sejak awal, alat kelengkapan dewan melakukan pembahasan secara masif dan mendalam bersama mitra kerja eksekutif atau organisasi perangkat daerah terhadap seluruh kegiatan dalam anggaran perubahan ini," ujar Wisnu.

Ia menambahkan bahwa jajaran DPRD Kota Yogyakarta tidak hanya mengawal prosedur pembahasan dan pelaksanaan tata laksana raperda agar selesai tepat waktu, melainkan juga berfokus pada tahap pelaksanaan hingga evaluasi di lapangan. Wisnu menekankan bahwa



Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta memimpin sidang paripurna terkait APBD Perubahan 2026.

tahap pelaksanaan program justru menjadi fokus pengawasan yang paling krusial agar alokasi dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil warga. "Muara dari seluruh penggunaan anggaran negara, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata," tegasnya.

Dukungan terhadap kelancaran proses legislasi anggaran ini juga disuarakan oleh pimpinan dewan lainnya. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbijat Nurjanat, memastikan bahwa seluruh tahapan pengkajian anggaran akan ditempuh sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. "Kami akan mengkaji secara mendalam setiap usulan perubahan anggaran ini demi kepentingan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Di sisi lain, kami juga mengapresiasi kinerja jajaran eksekutif dan berharap kinerja positif tersebut terus

ditingkatkan saat merealisasikan program-program APBD Perubahan kelak," tutur Sinarbijat.

Dari sisi eksekutif, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa penataan kebijakan anggaran daerah terus diarahkan agar senantiasa transparan, akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Ia memaparkan bahwa tematik pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 berlandaskan pada visi besar yang mencakup tiga kata kunci utama, yaitu Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadilan.

Menurut Hasto, visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintah dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang terus bertumbuh dan berkembang. "Tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, dan moral sebagai identitas khas kota yang

berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan," tegasnya. Dalam pemaparannya, Hasto menyampaikan struktur perubahan fiskal

daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Postur total APBD Kota Yogyakarta sebelum perubahan yang mencatatkan angka sebesar Rp1,9 triliun, kini naik se-

besar Rp205,1 miliar sehingga nilainya melonjak menjadi Rp2,1 triliun pada Perubahan APBD 2026. Pertumbuhan ini disokong oleh kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp38,08

miliar, yang terdiri dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp20,87 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp17,2 miliar.

Selain itu, lonjakan juga terjadi pada penerimaan pembiayaan daerah yang naik dari Rp68,3 miliar menjadi Rp235,3 miliar. Pos penerimaan pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasto menegaskan bahwa penyesuaian postur anggaran ini merupakan langkah responsif pemerintah dalam menyikapi berbagai dinamika eksternal maupun internal yang terjadi sepanjang tahun berjalan. "Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui alokasi sumber daya yang efektif dan efisien," ungkap Hasto. (Dhi)



Penandatanganan kesepakatan bersama terkait Raperda APBD Perubahan 2026.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005